

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari bahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, serta saran yang akan disampaikan dalam penerapan sistem informasi akuntansi pelaporan keuangan pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat.

5.1 KESIMPULAN

BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat merupakan instansi yang mengelola dana APBD yang akan dilaporkan setiap periodenya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut. Dalam kegiatan pelaporan keuangan, BAPPEDA menggunakan aplikasi berbasis web yang disediakan oleh pemerintah bernama SIPD yang membantu salah satu tahapan dalam pelaporan keuangan. Yang pelaksanaannya melibatkan beberapa pejabat pemegang kuasa dan PPTK yang bertanggungjawab atas pelaksanaan mekanisme pelaporan keuangan. Berikut adalah kesimpulan terkait penerapan sistem informasi akuntansi pelaporan keuangan pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat.

1. Pelaksanaan sistem informasi akuntansi pelaporan keuangan BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat didukung oleh penggunaan aplikasi SIPD. Seluruh dasar hukum yang mendukung aktivitas pelaporan telah terpenuhi. Serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pemegang kuasa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bagian-bagian yang terlibat dalam aktivitas pelaporan keuangan BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat adalah Kepala Badan, Sekretaris, Kasubag Keuangan

serta Bendahara Pembantu.

3. Dokumen-dokumen yang terkait pada aktivitas pelaporan keuangan BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat adalah SPD, SPP, SPM, SP2D, SPJ dengan dokumen hasil akhir berupa LRA dan Neraca
4. Mekanisme penggunaan aplikasi SIPD pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat dimulai dari penyusunan SPD sampai dengan Neraca
5. Kendala dan Resiko yang relevan dihadapi dalam Pelaporan Keuangan BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat adalah keterlambatan penetapan standar harga yang beresiko terhadap gangguan perencanaan anggaran, ketidakakuratan estimasi biaya dan keterlambatan penyusunan laporan keuangan.bulanan BAPPEDA.
6. Pengendalian Internal terhadap Kendala dan Resiko yang relevan dihadapi BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat adalah melakukan Koordinasi dengan BPKAD dan Inspektorat serta melakukan Pengusulan Standar Harga melalui Aplikasi SIPD.
7. Pengendalian Internal yang diterapkan oleh BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat mencakup lingkungan pengendalian yang kuat, penilaian resiko yang tepat, komunikasi efektif, aktivitas pengendalian yang ketat, dan pemantauan berkelanjutan. Langkah-langkah ini memastikan bahwa pelaporan keuangan BAPPEDA dilakukan secara akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mengatasi kendala dan risiko yang relevandalam pelaporan keuangan.

5.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan mengenai pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi Pelaporan Keuangan pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh instansi guna meningkatkan kinerja pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. SOP yang ada disarankan agar terus diperbaiki, untuk itu dilakukan penyempurnaan SOP terkait Sistem Informasi Akuntansi yang berkaitan dengan Pelaporan Keuangan pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat
2. Pengoptimalan Sistem Informasi dalam mengintegrasikan sistem yang digunakan (SIPD atau lainnya) untuk memastikan data yang konsisten dan mudah diakses.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pelatihan dan pengembangan dengan mengadakan pelatihan dan program pengembangan keterampilan bagi staff untuk meningkatkan kompetensi.

